

**PEMBERIAN LAYANAN INFORMASI UNTUK MENINGKATKAN
MOTIVASI EKONOMI KURANG MAMPU UNTUK MELANJUTKAN
KE SMA PADA SISWA KELAS IX SMP SWASTA BANDUNG
TAHUN PEMBELAJARAN 2017/2018**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
guna Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada
Program Studi Bimbingan dan Konseling*

OLEH

AMAN TUA DONGORAN
NPM. 1402080098



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. 061-6622400 Ext. 22, 23, 30
Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

BERITA ACARA

Ujian Mempertahankan Skripsi Sarjana Bagi Mahasiswa Program Strata 1
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 02 April 2018, pada pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, memperhatikan dan memutuskan bahwa:

Nama : Aman Tua Dongoran
NPM : 1402080098
Program Studi : Bimbingan dan Konseling
Judul Skripsi : Pemberian Layanan Informasi untuk Meningkatkan Motivasi Ekonomi Kurang Mampu untuk Melanjutkan Studi ke SMA pada Siswa Kelas IX SMP Swasta Bandung Tahun Pembelajaran 2017/2018

Dengan diterimanya skripsi ini, sudah lulus dari ujian Komprehensif, berhak memakai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd).

Ditetapkan () Lulus Yudisium
() Lulus Bersyarat
() Memperbaiki Skripsi
() Tidak Lulus

PANITIA PELAKSANA

Ketua

Sekretaris

Dr. Elfrianto Nasution, S.Pd., M.Pd

Dra. Hj. Syamsuarnifa, M.Pd

ANGGOTA PENGUJI:

1. Drs. Zaharuddin Nur, MM
2. Dra. Hj. Mariani Nasution, M.Pd
3. Dra. Hj. Latifah Hanum, M.Psi

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6619056 Medan 20238
Website: <http://www.fkip.umstu.ac.id> E-mail: fkip@umstu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini diajukan oleh mahasiswa di bawah ini:

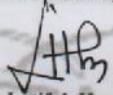
Nama : Aman Tua Dongoran
NPM : 1402080098
Program Studi : Bimbingan dan Konseling
Judul Skripsi : Pemberian Layanan Informasi untuk Meningkatkan Motivasi Ekonomi Kurang Mampu untuk Melanjutkan Studi ke SMA pada Siswa Kelas IX SMP Swasta Bandung Tahun Pembelajaran 2017/2018

sudah layak disidangkan.

Medan, Maret 2018

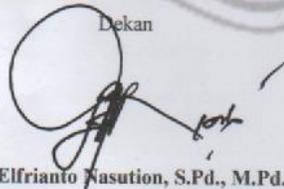
Disetujui oleh:

Pembimbing


Dra. Hj. Latifah Hanum, M.Psi

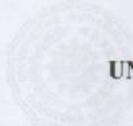
Diketahui oleh:

Dekan


Dr. Elfrianto Nasution, S.Pd., M.Pd.

Ketua Program Studi


Dra. Jamila, M.Pd



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

SURAT PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Nama lengkap	: AMAN TUA DONGORAN
Tempat/ Tgl. Lahir	: Medan, 03 November 1994
Agama	: Islam
Status Perkawinan	: Kawin/Belum Kawin/Duda/Janda*)
No. Pokok Mahasiswa	: 1402080098
Program Studi	: Bimbingan dan Konseling
Alamat Rumah	: Jl. Ampera VIII
	Telp/Hp: 0822-2057-2323
Pekerjaan/ Instansi	: -
Alamat Kantor	: -

Melalui surat permohonan tertanggal 17 Maret 2018 telah mengajukan permohonan menempuh ujian skripsi. Untuk ujian skripsi yang akan saya tempuh, menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya,:

1. Dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani
2. Siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penguji,
3. Bersedia menerima keputusan Panitia Ujian Skripsi dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun;
4. Menyadari bahwa keputusan Panitia Ujian ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran tanpa paksaan dan tekanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun, untuk dipergunakan bilamana dipandang perlu. Semoga Allah SWT meridhoi saya. Amin.

SAYA YANG MENYATAKAN,



(Handwritten Signature)

AMAN TUA DONGORAN

1ABSTRAK

Aman Tua Dongoran. 1402080098. “pemberian layanan informasi untuk meningkatkan motivasi ekonomi kurang mampu untuk melanjutkan ke SMA pada siswa kelas IX SMP SWASTA BANDUNG tahun pembelajaran 2017/2018”. *Skripsi: Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Program Studi Bimbingan Dan Konseling Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.*

Permasalahan selalu ada dalam kehidupan, pendidikan merupakan salah satu modal utama dalam menghadapi masa depan, dalam pendidikan formal yaitu sekolah siswa diharapkan aktif, dimana kunci utamanya adalah dapat berinteraksi dengan lingkungan sekolah yaitu teman, guru serta seluruh perangkat sekolah serta tidak berbuat kerusakan. Dalam kehidupan pendidikan sangat penting tidak memandang usia dan waktu. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi bagi ekonomi kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke SMA di SMP SWASTA BANDUNG tahun pembelajaran 2017/2018. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IX SMP SWASTA BANDUNG berjumlah sebanyak 101 siswa dan objeknya adalah 30 siswa. Adapun instrument yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara yang sesuai dengan penerapan layanan informasi untuk meningkatkan motivasi ekonomi kurang mampu. Adapun teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan reduksi data, penyajian data, dan mengambil kesimpulan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa penerapan layanan informasi untuk motivasi siswa ekonomi kurang mampu seiring pembiasaan siswa dalam pendidikan. Dengan adanya layanan tersebut, masalah anak yang tidak percaya diri untuk melanjutkan SMA dengan ekonomi rendah khususnya pada kelas IX SMP SWASTA BANDUNG Tahun Ajaran 2017/2018.

Kata Kunci : Penerapan Layanan informasi, motivasi ekonomi.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah yang sejak zaman azali adalah satu-satunya yang bangga dengan kebesaran-Nya, satu-satunya yang abadi dengan keluhuran-Nya, yang satu-satunya akan tetap kekal sampai kapanpun.

Sholawat berangkai salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sang Nabi yang berdudi pekerti mulia yang diutus sebagai rahmat bagi semesta alam oleh Allah Yang Maha Pengasi Lagi Maha Penyayang.

Skripsi yang berjudul : **PEMBERIAN LAYANAN INFORMASI UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI EKONOMI KURANG MAMPU UTNUK MELANJUTKAN KE SMA PADA SISWA KELAS IX SMP SWASTA BANDUNG TAHUN PEMBELAJARAN 2017/2018.** Adalah untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat dalam mencapai gelar sarjana pendidikan (S.Pd) pada Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (FKIP) di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Selama penulis skripsi ini, ada kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, baik itu dari segi teknik penyajian ataupun dari segi tata bahasanya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam upaya perbaikan dalam laporan-laporan berikutnya.

Selama penyusunan proposal skripsi penulis juga mendapatkan berbagai hambatan, kesulitan maupun rintangan yang telah dilalui. Namun berkat bimbingan Ibu Dosen Pembimbing dan juga berbagai pihak, maka penulis akhirnya dapat menyelesaikannya. Untuk itu, dikesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada:

- Terutama dan teristimewa kepada kedua orang tua H. Samsul Dongoran dan Hj. Nur Hamda Batu-bara senantiasa mendukung, menyemangati, membimbing saya dalam pendidikan, dan yang paling sabar membiayai perkuliahan saya.
- Terima kasih buat ketiga adik saya Rosita D, Nurjalila D, Rahma Nur D yang ikut mendukung saya dalam dunia pendidikan.
- Bapak Dr. Agussani M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
- Bapak Dr. Elfrianto Nasution, S.Pd, M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
- Ibu Dra. Jamila M.Pd selaku Ketua Program Studi Pendidikan Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) selaku Dosen Penguji skripsi saya.
- Ibu Dra. Hj. Latifah Hanum, M.Psi selaku Dosen Pembimbing saya yang sangat sabar membimbing, menasehati, serta memberikan saran dan kritikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya.

- Bapak Drs. Zaharuddin Nur, MM selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)
- Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan khususnya pada Program Studi Pendidikan Bimbingan dan Konseling beserta staf pegawai biro Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
- Bapak Paisal Lubis selaku kepala sekolah SMP Swasta Bandung.
- Terima kasih kepada sahabat saya Nurul Suci Pratiwi, Siti Nurhaslinda Sitepu, Rahim Sakedangang telah ikut membantu, menyemangati, dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi saya.
- Sahabat saya dari kecil hingga sekarang Bleh Gewa Handika, Rahmat Hidayat, Lutfi Al Hazmi dan Kanigia Tambunan yang ikut membantu saya dalam menyelesaikan skripsi.
- Terima kasih kepada rekan-rekan PPL di SMP Swasta Bandung yang telah membantu saya.
- Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan BK A sore stambuk 2014 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini, mengharapkan kritik dan saran. Dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak.

Akhir kata penulis berharap semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk bagi kita semua Amin.

Medan, Maret 2018

Penulis

Aman Tua Dongoran

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Batasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	8
A. Kerangka Teori.....	8
1. Layanan informasi	8
1.1 Pengertian Layanan informasi	8
1.2 Tujuan dan fungsi Layanan informasi	9
1.3 Alasan penyelenggaraan Layanan informasi	12

1.4 Jenis-jenis informasi.....	13
1.5 Metode Layanan informasi	17
1.6 Materi Layanan informasi	18
1.7 Penyelenggaraan Layanan informasi	18
2. Ekonomi kurang mampu	19
2.1 Pengertian Kemiskinan	19
2.2 Defenisi Kemiskinan secara umum	20
2.3 Skema terbentuknya perangkat Kemiskinan	23
2.4 Bentuk dan jenis Kemiskinan	26
2.5 Indikator-indikator mengenai Kemiskinan	31
2.6 Indikator-indikator Kemiskinan berdasarkan dimensi ekonomi	31
2.7 Indikator Kemiskinan berdasarkan dimensi pemerintah	33
2.8 Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah prosedur Kemiskinan	34
2.9 Mengenai pemekaran wilayah	38
3. Kerangka teoritik penelitian dalam memahami permasalahan	39

BAB III METODE PENELITIAN 44

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	44
B. Subjek dan Objek	45
C. variabel Penelitian.....	47
D. Defenisi Operasional penelitian	47
E. Teknik Pengumpulan Data atau Instrumen Penelitian	48

F. Teknik Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Deskripsi Data.....	52
B. Deskripsi Hasil Penelitian.....	57
C. Diskusi Hasil Penelitian.....	66
D. Keterbatasan Penelitian.....	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Rincian Waktu Pelaksanaan Penelitian	45
Tabel 3.2 Objek Penelitian	47
Tabel 4.1 Daftar guru pembimbing.....	52
Tabel 4.2 sarana dan prasarana	53
Tabel 4.3 data guru SMP Swasta Bandung.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.3	55
------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

4. Sampul Skripsi
5. Sampul Proposal
6. Berita Acara Sidang
7. Pengesahan Skripsi
8. Berita Acara Bimbingan Pribadi
9. Berita Acara Bimbingan Riset
10. Surat Pernyataan
11. Form K-1
12. Form K-2
13. Surat Keterangan Seminar
14. Siklus Pengajuan Judul
15. Pengesahan Proposal

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi seperti sekarang ini mutlak menuntut seseorang untuk membekali diri dengan ilmu pengetahuan agar dapat bersaing dan mempertahankan diri dari semakin kerasnya kehidupan dunia dan dari berbagai tantangan yang mau tidak mau harus dihadapi. Melalui pendidikanlah seseorang dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang mereka butuhkan baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan menjadi salah satu kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi, yang mempunyai tujuan tinggi dari sekedar untuk tetap hidup, sehingga manusia menjadi lebih terhormat dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada yang tidak berkependidikan.

Persoalan pendidikan yang selalu muncul pada awal tahun ajaran baru adalah persoalan yang sangat kompleks, dimana siswa dihadapkan pada permasalahan yang menyangkut dengan kondisi orang tua yang akan menopang kelangsungan pendidikannya. Kelangsungan pendidikan anak terkait dengan masalah harapan orangtua terhadap masa depan anak. Melalui proses pendidikan yang bermutu dan tepat potensi anak dapat berkembang secara maksimal dan dapat dihasilkan sumberdaya manusia masa depan yang berkualitas dan mampu memecahkan persoalan-persoalan hidupnya dimasa mendatang.

Masalah ekonomi kurang mampu dan harapan masa depan anak dari orangtua pada akhirnya akan menimbulkan masalah bagi orangtua untuk menentukan alternatif 1 2 pilihan terhadap kelanjutan sekolah anak-anaknya. Kedua masalah tersebut diatas merupakan faktor ekstrinsik yang meningkatkan motivasi anak untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

Motivasi adalah suatu perubahan energi yang baik yang ada di dalam diri seseorang dengan timbulnya afektif atau perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan Mc.Donald (Oemar Hamalik, 2003: 106). Untuk itu sangat besar peluang siswa ekonomi kurang mampu untuk melanjutkan ke sekolah menengah atas Pemerintah telah memberikan program yang membantu siswa kurang mampu untuk melanjutkan studi ke sekolah menengah atas yaitu adalah program beasiswa dan bagi keluarga yang kurang mampu. itu merupakan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Program ini memberikan bantuan biaya kuliah dan biaya hidup kepada mahasiswa dari keluarga miskin. Dengan program bidik misi ini, mahasiswa dibebaskan dari biaya kuliah dan mendapatkan uang saku Rp 500 ribu per bulan. Untuk memastikan kelayakan, akan dilakukan verifikasi ulang oleh tim dari masing-masing Dalam penghantar Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Pendidikan Bidik Misi 2014. Perguruan tinggi yang menampung bantuan yang lebih banyak adalah perguruan tinggi yang telah diakui kualitasnya baik oleh pemerintah.

Dalam Bimbingan Konseling terdapat 9 (sembilan) Layanan Bimbingan Konseling. Salah satunya adalah Layanan Informasi. Menurut Prayitno dan Erman

Amti (2004:259-260) layanan informasi adalah kegiatan memberikan pemahaman kepada 3 individu – individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan, atau untuk menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang dikehendaki. Dengan demikian, Layanan Informasi itu pertama-tama merupakan perwujudan dari fungsi pemahaman dalam bimbingan dan konseling.

Penyajian informasi itu dimaksudkan untuk memberikan wawasan kepada para siswa sehingga ia dapat menggunakan informasi itu baik untuk mencegah atau mengatasi kesulitan yang dihadapinya, serta untuk merencanakan masa depan. Perencanaan kehidupan ini mencakup, kehidupan dalam studi, dalam pekerjaan, maupun dalam membina keluarga.

Dari pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa Layanan Informasi merupakan pemberian suatu informasi yang dilakukan konselor kepada siswa-siswi berupa materi maupun kajian yang mendukung perkembangan wawasan siswa untuk pengembangan diri. Dalam layanan informasi terjadi interaksi antara siswa dengan guru pembimbing/konselor sebagai sumber informasi memiliki kebutuhan untuk menyampaikan informasi (bahan ajar) kepada siswa sebagai penerima informasi.

Dari hasil studi awal observasi terhadap siswa yang akan diteliti serta rekomendasi dari kepala sekolah serta koordinator BK disekolah, yaitu dari 266 siswa Sekolah Menengah Atas Pada Siswa Kelas IX SMP Swasta Bandung Tahun

Pembelajaran 2017/2018 yang berasal dari ekonomi kurang mampu yaitu berjumlah 31 siswa. Maka perlu diberikan layanan informasi untuk mengatasi masalah tersebut. Dari jumlah siswa ekonomi kurang mampu yang tidak memiliki motivasi untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi, maka penulis memberikan layanan informasi untuk dapat membantu siswa yang berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu yang tidak memiliki motivasi melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Oleh karena itu penulis merencanakan penelitian dengan judul “Pemberian layanan informasi terhadap peningkatan motivasi siswa ekonomi kurang mampu untuk melanjutkan studi ke siswa Sekolah Menengah Atas Pada Siswa Kelas IX SMP Swasta Bandung Tahun Pembelajaran 2017/2018.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang dapat diidentifikasi antara lain:

1. Siswa ekonomi kurang mampu kurang memiliki motivasi untuk melanjutkan studi ke (SMA) sekolah menengah atas.
2. Sejauhmana pemberian layanan informasi akan dapat meningkatkan motivasi siswa ekonomi kurang mampu untuk melanjutkan studi ke (SMA) sekolah menengah atas.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis membatasi masalah yang akan dikaji agar tujuan penelitian lebih terarah yaitu, Pemberian layanan informasi terhadap peningkatan motivasi siswa ekonomi kurang mampu untuk melanjutkan melanjutkan studi ke siswa Sekolah Menengah Atas Pada Siswa Kelas IX SMP Swasta Bandung Tahun Pembelajaran 2017/2018.

D. Rumusan Masalah

Adapun yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pemberian layanan informasi terhadap peningkatan motivasi siswa ekonomi kurang mampu untuk melanjutkan studi ke siswa Sekolah Menengah Atas Pada Siswa Kelas IX SMP Swasta Bandung Tahun Pembelajaran 2017/2018 ?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberian layanan informasi yang dilakukan berhasil atau tidak nya terhadap peningkatan motivasi siswa ekonomi kurang mampu untuk melanjutkan studi siswa (SMA) Sekolah Menengah Atas Pada Siswa Kelas IX SMP Swasta Bandung Tahun Pembelajaran 2017/2018.

F. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian di atas diharapkan penelitian ini memiliki beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang pendidikan, psikologi serta bimbingan dan konseling terutama pada tingkat SMP/MTs.
- b. Memperluas pemahaman siswa tentang kemampuan serta kompetensi yang ada didalam dirinya agar dapat mengaktualisasikan dirinya secara baik.

2. Manfaat Praktis

- a. Melanjutkan ke (SMA) Sekolah Menengah Atas, Pada Siswa Kelas IX SMP Swasta Bandung Tahun Pembelajaran 2017/2018.
- b. Bagi Peneliti sebagai bahan pembelajaran untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam Bagi Konselor Sekolah Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan dalam membantu siswa ekonomi kurang mampu terhadap peningkatan motivasi untuk melanjutkan studi ke sekolah menengah atas (SMA) melalui pemberian layanan informasi.
- c. Bagi Siswa SMP Swasta Bandung Sebagai bahan masukan bagi siswa ekonomi kurang mampu. Untuk melanjutkan ke SMA (sekolah menengah atas).
- d. Bagi Sekolah Sebagai bahan masukan dalam membantu siswa ekonomi kurang mampu Untuk menerapkan dan meningkatkan motivasi siswa ekonomi kurang mampu untuk melanjutkan studi ke (SMA) Sekolah Menengah Atas Pada Siswa Kelas IX SMP Swasta Bandung Tahun Pembelajaran 2017/2018.

e. Bagi Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Sebagai bahan referensi dalam menambah pemahaman dan pengembangan keilmuan khususnya mahasiswa jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan di Universitas Muhamadiyah Sumatra Utara.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kerangka Teori

1. Layanan Informasi

1.1 Pengertian Layanan Informasi

Layanan informasi yaitu layanan Bimbingan dan Konseling yang memungkinkan peserta didik (klien) menerima dan memahami berbagai informasi (seperti: informasi pendidikan dan informasi jabatan) yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan pesertadidik (klien). Klien tidak hanya peseta didik tetapi bias juga orang tua atau wali.

Banyak pendapat para ahli mengenai layanan informasi diantaranya adalah: menurut Prayitno (2004: 259-260) Layanan Informasi adalah kegiatan memberikan pemahaman kepada individu-individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan, atau untuk menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang dikehendaki. Dengan demikian, layanan informasi itu pertama-tama merupakan perwujudan dari fungsi pemahaman dalam bimbingan dan konseling.

Menurut Budi Purwoko (2008: 52) penyajian informasi dalam rangka program bimbingan ialah kegiatan membantu siswa dalam menggali lingkungannya, terutama tentang kesempatan-kesempatan yang ada di dalamnya, yang dapat

dimanfaatkan siswa baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang. Penyajian informasi dimaksudkan untuk memberi wawasan kepada para siswa, sehingga ia dapat menggunakan informasi itu baik untuk mencegah atau mengatasi kesulitan yang dihadapinya, serta untuk merencanakan masa depan. Perencanaan kehidupan ini mencakup kehidupan dalam studinya, dalam pekerjaannya, maupun dalam membina keluarga.

Sedangkan menurut Tohirin (2007: 147) mengungkapkan bahwa “layanan informasi merupakan layanan yang berupaya memenuhi kekurangan individu akan informasi yang mereka perlukan. Layanan informasi juga bermakna usaha-usaha untuk membekali siswa dengan pengetahuan serta pemahaman tentang lingkungan hidupnya dan tentang proses perkembangan anak muda”.

Dari beberapa pengertian tentang layanan informasi diatas, maka dapat diapahami bahwa layanan informasi adalah sutau kegiatan atau usaha untuk membekali para siswa tentang berbagai macam pengetahuan supaya mereka mampu mengambil keputusan secara tepat dalam kehidupannya.

1.2 Tujuan dan Fungsi Layanan Informasi

Layanan informasi bertujuan untuk membekali individu dengan berbagai hal yang berguna untuk mengenali diri, merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, anggota keluarga dan masyarakat. Pemahaman yang diperoleh melalui layanan informasi, digunakan sebagai bahan acuan dalam meningkatkan kegiatan dan prestasi belajar, mengembangkan cita-cita, menyelenggarakan kehidupan sehari-hari dalam mengambil sebuah keputusan.

Menurut Budi Purwoko (2008: 52) tujuan yang ingin dicapai dengan penyajian informasi adalah sebagai berikut:

- a. Para siswa dapat mengorientasikan dirinya kepada informasi yang diperolehnya terutama untuk kehidupannya, baik semasa masih sekolah maupun setelah tamat sekolah.
- b. Para siswa mengetahui sumber-sumber informasi yang diperlukan.
- c. Para siswa dapat menggunakan kegiatan kelompok sebagai sarana memperoleh informasi.
- d. Para siswa dapat memilih dengan tepat kesempatan-kesempatan yang ada didalam lingkungannya sesuai dengan minat dan kemampuannya.

Winkel & Sri Hastuti (2006: 316) mengatakan bahwa layanan pemberian informasi diadakan untuk membekali para siswa dengan pengetahuan tentang data dan fakta dibidang pendidikan disekolah, bidang pekerjaan dan bidang perkembangan pribadi-sosial, supaya mereka dengan belajar tentang lingkungan hidupnya lebih mampu mengatur dan merencanakan kehidupannya sendiri.

Program bimbingan yang tidak memberikan layanan pemberian informasi akan menghalangi peserta didik untuk berkembang lebih jauh, karena mereka membutuhkan kesempatan untuk mempelajari data dan fakta yang dapat mempengaruhi jalan hidupnya. Namun, mengingat luasnya informasi yang tersedia dewasa ini, mereka harus mengetahui pula informasi manakah yang relevan untuk mereka dan mana yang tidak relevan, serta informasi macam apa yang menyangkut data dan fakta yang tidak berubah dan ada yang dapat berubah dengan beredarnya roda waktu.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat mengakibatkan corak kehidupan masyarakat terus berubah, sehingga sebagian dari fakta dan data yang kemarin merupakan kenyataan, besok lusa sudah bukan kenyataan lagi. Maka, disamping mendapatkan informasi tentang kenyataan lingkungan hidup yang berlaku sekarang ini, peserta didik harus memperoleh informasi tentang berbagai cara mengikuti perubahan dalam lingkungan hidupnya, dan dari sumber-sumber yang mana dapat digali pengetahuan tentang hal-hal yang telah berubah atau kiranya akan berubah dikemudian hari.

Dari beberapa pendapat di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa tujuan layanan informasi adalah supaya para siswa memperoleh informasi yang relevan dalam rangka memilih dan mengambil keputusan secara tepat, guna pencapaian pengembangan diri secara optimal. Dalam penelitian ini tujuan dari layanan informasi adalah membekali siswa dengan berbagai informasi tentang potensi diri, sehingga siswa mampu meningkatkan pemahaman potensi diri guna mencapai kualitas hidup yang lebih baik.

Layanan informasi berfungsi untuk pemahaman dan pencegahan. Selain itu juga, bisa diartikan sebagai penyampaian berbagai informasi kepada sasaran agar individu dapat mengolah dan memanfaatkan informasi tersebut demi kepentingan hidup dan perkembangannya atau bisa juga layanan informasi merupakan layanan bimbingan dan konseling yang ditujukan untuk memberikan berbagai informasi. Agar wawasan para siswa tentang berbagai hal lebih terbuka, seperti informasi cara belajar yang

efektif, bahayanya penggunaan narkoba atau informasi tentang pendidikan dan dunia kerja dan informasi tentang bagaimana mengurangi kelupaan dalam belajar dan meningkatkan daya ingat siswa.

1.3 Alasan Penyelenggaraan Layanan Informasi

Menurut Prayitno & Erman Amti (2004: 260-261) ada tiga alasan utama mengapa layanan informasi di selenggarakan.

- a. Membekali individu dengan berbagai macam pengetahuan tentang lingkungannya yang di perlukan untuk memecahkan masalah yang di hadapi berkenaan, dengan lingkungan sekitar, pendidikan, jabatan, maupun sosial budaya.
- b. Kemungkinan individu dapat menentukan arah hidupnya “kemana dia ingin pergi”. Syarat dasar untuk dapat menentukan arah hidup adalah apabila ia mengetahui apa (informasi) yang harus dilakukan serta bagaimana bertindak secara kreatif dan dinamis berdasarkan atas informasi-informasi yang ada itu.
- c. Setiap individu adalah unik.

Winkel & Sri Hastuti (2006: 317) Ada tiga alasan pokok mengapa layanan pemberian informasi merupakan usaha vital dalam keseluruhan program bimbingan yang terencana dan terorganisasi.

1. Siswa membutuhkan informasi yang relevan sebagai masukan dalam mengambil ketentuan mengenai pendidikan lanjut sebagai persiapan untuk memangku suatu jabatan dimasyarakat dengan memiliki pengetahuan yang tepat mungkinh bahwa jumlah pilihan yang dapat mereka pertimbangkan bertambah.
2. Pengetahuan yang tepat dan benar membantu siswa untuk berpikir lebih rasional tentang perencanaan masa depan dan tuntutan penyesuaian diri dari pada mengikuti sembarang keinginan saja tanpa memperhitungkan kenyataan dalam lingkungan hidupnya. Informasi yang relevan dapat membebaskan siswa dari keterkaitan pada pola pikir yang kaku, dan sekaligus memperluas cakrawal pandangannya.
3. Informasi yang sesuai dengan daya tangkapnya menyadarkan siswa akan hal-hal yang akan berubah dengan bertambahnya umur dan pengalaman. Misalnya, siswa yang bercita-cita dan berkemampuan untuk menjadi seorang

ahli geofisika dan mempunyai informasi tentang berbagai institusi pendidikan tinggi yang memiliki program studi yang sesuai, tidak terpikat pada satu institusi saja; dia dapat memilih diantara beberapa institusi pendidikan tinggi dan menjatuhkan pilihannya atas salah satu diantaranya, mana yang paling cocok baginya dan paling memberikan harapan akan mencapai cita-citanya. Sekaligus siswa itu akan tergolong untuk meninjau kembali keinginannya diterima diinstitusi yang favorit dan bergengsi, bila dia mengetahui bahwa kemungkinan untuk diterima disitu kecil karena saingannya banyak.

Dari beberapa pendapat tentang alasan penyelenggara layanan informasi diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa alasan penyelenggara layanan informasi adalah karena siswa membutuhkan informasi yang relevan sebagai bekal dalam menghadapi berbagai macam dinamika kehidupan secara positif dan rasional, baik sebagai pelajar maupun anggota masyarakat. Terkait dengan penelitian ini, ada dua alasan penyelenggara layanan informasi. *pertama*, untuk membuktikan bahwa layanan informasi bisa meningkatkan pemahaman siswa terhadap potensi diri. *Kedua* disadari atau tidak siswa sangat membutuhkan informasi tentang pemahaman potensi diri sebagai modal awal dalam menggapai cita-cita dan tujuan hidup yang mereka inginkan.

1.4 Jenis – Jenis Informasi

Menurut Prayitno & Erman Amti (2004: 261-268) pada dasarnya jenis dan jumlah informasi tidak terbatas. Namun, dalam rangka pelayanan bimbingan dan konseling hanya akan dibicarakan tiga jenis informasi, yaitu: a) Informasi pendidikan, b) informasi pekerjaan, c) informasi sosial budaya.

a. Informasi pendidikan

Dalam bidang pendidikan banyak individu yang berstatus siswa atau calon siswa yang dihadapkan pada kemungkinan timbulnya masalah atau kesulitan. Diantara masalah atau kesulitan tersebut berhubungan dengan (a) pemilihan program studi, (b) pemilihan sekolah fakultas dan jurusannya, (c) penyesuaian diri dengan program studi, (d) penyesuaian diri dengan suasana belajar, dan (e) putus sekolah. Mereka membutuhkan adanya keterangan atau informasi untuk dapat membuat pilihan dan keputusan yang bijaksana.

b. Informasi jabatan

Saat-saat transisi dari dunia pendidikan dunia kerja sering merupakan masa yang sangat sulit bagi banyak orang muda. Kesulitan itu terletak tidak saja dalam mendapatkan jenis pekerjaan yang cocok, tetapi juga dalam penyesuaian diri dengan suasana kerja yang baru dimasuki dan perkembangan diri selanjutnya.

c. Informasi sosial budaya

Hal ini dapat dilakukan melalui penyajian informasi sosial budaya yang meliputi, macam-macam suku bangsa, adat istiadat, agama dan kepercayaan, bahasa, potensi-potensi daerah dan kekhususan masyarakat atau daerah tertentu.

Budi Purwoko (2008: 53) juga menjelaskan, jenis-jenis informasi yang penting bagi siswa waktu masih sekolah, misalnya informasi tentang:

- a. Kondisi fisik sekolahnya, fasilitas yang tersedia, guru-gurunya, para karyawan bagi administrasi, dan sebagainya.
- b. Informasi tentang program studi disekolahnya, yang bersumber dari kurikulum yang berlaku.
- c. Informasi tentang cara belajar efisien, yang bersumber dari para pembimbingnya.
- d. Informasi tentang usaha kesehatan sekolah yang bersumber dari dokter, para perawat sekolah.

Sedangkan pendapat lain yang dikemukakan oleh Gunawan (2001: 91) layanan informasi dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu :

- a. Informasi pendidikan

Informasi pendidikan sebagai data yang valid berguna tentang semua jenis pendidikan sekarang dan yang akan datang serta kesempatan-kesempatan latihan danuntutannya. Informasi yang diberikan meliputi peraturan dan jam sekolah, kegiatan kurikuler yang tersedia dan mata pelajaran, organisasi sekolah dan aktivitas sosialnya, nilai pendidikan, kredit yang diambil, program pendidikan setelah tamat sekolah, mata pelajaran yang dituntut untuk memasuki perguruan tinggi, biaya untuk memasuki perguruan tinggi, surat menyurat disekolah dan lain sebagainya.

- b. Informasi pekerjaan

Informasi pekerjaan sebagai informasi yang valid dan berguna tentang posisi pekerjaan dan lapangan kerja. Termasuk di dalam tugas-tugas tuntutan dan persyaratan masuk, kondisi pekerjaan, imbalan pekerjaan, pola kemajuan, kebutuhan tenaga kerja dan informasi yang lebih lanjut.

c. Informasi sosial pribadi

Informasi pribadi berkaitan dengan pemahaman diri sendiri dan pemahaman orang lain. Informasi sosial pribadi sebagai data yang valid dan berguna tentang kesempatan dan pengaruh dari manusia dan lingkungan fisik terhadap pertumbuhan pribadi dan hubungan internasionalnya dengan orang lain. Informasi ini berkaitan dengan faktor-faktor diantaranya sebagai berikut: mencapai pemahaman diri, mencapai tingkat kematangan hubungan baik dengan lawan jenis, mengerti peranan pria dan wanita, pengembangan kepribadian yang sehat, mengerti sifat dan tingkah laku orang lain, perkembangan fisik dan mental yang sehat.

Dari berbagai pendapat diatas, dapat di pahami bahwa materi layanan informasi pada dasarnya tidak terbatas khusus dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, layanan yang diberikan kepada siswa dibedakan menjadi empat tipe yaitu, informasi dalam bidang pribadi, sosial, belajar dan karier. Namun demi tercapainya tujuan dari layanan informasi, maka materi informasi sebaiknya disesuaikan dengan tujuan dari pelaksanaan layanan informasi itu sendiri. Kaitannya dengan penelitian ini, maka materi layanan informasi yang akan diberikan adalah informasi tentang berbagai jenis potensi diri yang dimiliki oleh siswa yang sangat mungkin untuk dikembangkan guna mencapai prestasi dan kualitas hidup yang terbaik.

1.5 Metode Layanan Informasi

Pembimbing atau konselor kepada seluruh siswa di sekolah. Metode yang digunakan bervariasi serta fleksibel dapat digunakan tergantung jenis informasi dan karakteristik peserta layanan. Beberapa teknik yang biasa digunakan untuk layanan informasi menurut beberapa ahli, diantaranya sebagai berikut :

1. Prayitno & Emran Anti (2004: 275), menjelaskan bahwa dalam pemberian layanan informasi kepada siswa dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti “metode ceramah, diskusi, wawancara, karya wisata, alat-alat peraga, dan alat-alat bantu lainnya, buku panduan, kegiatan sanggar karier dan sosiodrama”.
2. Tohirin (2007: 149-150) menyatakan bahwa layanan informasi dapat diberikan melalui :
 - a. Ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Melalui teknik ini, para peserta (klien) mendengarkan atau menerima ceramah dari guru bimbingan konseling. Selanjutnya diikuti dengan tanya jawab. Untuk pendalaman diikuti diskusi.
 - b. Melalui media. Penyimpanan informasi bisa dilakukan melalui media tertentu seperti alat peraga, media tertulis, media gambar, poster, dan media elektronik lainnya.
 - c. Acara khusus. Layanan informasi melalui cara ini dilakukan dengan acara khusus di sekolah. Dalam acara hari tersebut, disampaikan dengan berbagai informasi berkaitan dengan hari-hari tersebut dan dilakukan berbagai kegiatan yang terkait yang diikuti oleh seluruh siswa.
 - d. Narasumber. Layanan informasi juga bisa diberikan kepada peserta didik dengan mengundang narasumber. Dengan perkataan lain tidak semua informasi diketahui oleh pembimbing. Untuk informasi yang tidak diketahui oleh pembimbing, harus didatangkan atau diundang pihak lain yang lebih mengetahui. Pihak yang diundang, tentu disesuaikan dengan jenis informasi yang akan diberikan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa, pemberian layanan informasi kepada siswa dapat dilakukan melalui beberapa metode seperti ceramah, tanya jawab dan diskusi. Melalui metode ini diharapkan agar para peserta mendengarkan atau menerima ceramah dari guru bimbingan konseling, selanjutnya diikuti dengan tanya jawab serta untuk pendalaman diikuti dengan diskusi.

1.6 Materi Layanan Informasi

Materi yang dapat diangkat melalui layanan informasi ada berbagai macam, yaitu meliputi: informasi pengembangan pribadi, informasi kurikulum dan proses belajar mengajar, informasi jabatan, informasi kehidupan keluarga, sosial kemasyarakatan, keberagaman, sosial budaya, lingkungan dan juga informasi pendidikan tinggi.

1.7 Penyelenggaraan Layanan Informasi

Layanan informasi dapat diselenggarakan melalui ceramah, Tanya jawab, dan diskusi yang dilengkapi dengan peragaan. Selebaran, tayangan foto, film atau video, kunjungan keperusahaan-perusahaan. Berbagai narasumber, baik dari sekolah sendiri, atau dari sekolah lain, dari lembaga-lembaga pemerintahan, maupun dari berbagai kalangan dimasyarakat dapat diundang guna memberikan informasi kepada peserta didik. Namun perlu diingat bahwa semua kegiatan hendaknya direncanakan secara matang. Layanan informasi dapat dilaksanakan secara individual, klasikal dan ataupun diselenggarakan secara umum. Dapat juga diberikan secara lisan seperti jurnal, majalah dan leaflet.

2. Ekonomi Kurang Mampu

2.1 Pengertian Kemiskinan

Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup (Nugroho, 1995). Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya (Suryawati, 2004).

Pengertian kemiskinan yang saat ini populer dijadikan studi pembangunan adalah kemiskinan yang seringkali dijumpai di negara-negara berkembang dan 22 negara-negara dunia ketiga. Persoalan kemiskinan masyarakat di negara-negara ini tidak hanya sekedar bentuk ketidakmampuan pendapatan, akan tetapi telah meluas pada bentuk ketidakberdayaan secara sosial maupun politik (Suryawati, 2004). Kemiskinan juga dianggap sebagai bentuk permasalahan pembangunan yang diakibatkan adanya dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan pendapatan antar daerah (inter region income gap) (Harahap, 2006). Studi pembangunan saat ini tidak hanya memfokuskan kajiannya pada faktor-faktor

yang menyebabkan kemiskinan, akan tetapi juga mulai mengidentifikasi segala aspek yang dapat menjadikan miskin.

Jadi dapat disimpulkan bahwa “Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan”.

2.2 Definisi Kemiskinan Secara Umum Definisi

mengenai kemiskinan dibentuk berdasarkan identifikasi dan pengukuran terhadap sekelompok masyarakat/golongan yang selanjutnya disebut miskin (Nugroho, 2005:27). Pada umumnya, setiap negara termasuk Indonesia memiliki sendiri definisi seseorang atau suatu masyarakat dikategorikan miskin. Hal ini dikarenakan kondisi yang disebut miskin bersifat relatif untuk setiap negara misalnya kondisi perekonomian, standar kesejahteraan, dan kondisi sosial. Setiap definisi ditentukan menurut kriteria atau ukuran-ukuran berdasarkan kondisi tertentu, yaitu pendapatan rata-rata, daya beli atau kemampuan konsumsi rata-rata, status kependidikan, dan kondisi kesehatan.

Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk 23

menjamin kelangsungan hidup (Suryawati, 2004: 122). Kemampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan pokok berdasarkan standar harga tertentu adalah rendah sehingga kurang menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup pada umumnya. Berdasarkan pengertian ini, maka kemiskinan secara umum didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya yang dapat menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup.

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Laporan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan oleh Kementerian Bidang Kesejahteraan (Kesra) tahun 2004 menerangkan pula bahwa kondisi yang disebut miskin ini juga berlaku pada mereka yang bekerja akan tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasar.

Definisi kemiskinan kemudian dikaji kembali dan diperluas berdasarkan permasalahan-permasalahan kemiskinan dan faktor-faktor yang selanjutnya menyebabkan menjadi miskin. Definisi kemiskinan yang dikemukakan oleh

Chambers adalah definisi yang saat ini mendapatkan perhatian dalam setiap 24 program pengentasan kemiskinan di berbagai negara-negara berkembang dan dunia ketiga. Pandangan yang dikemukakan dalam definisi kemiskinan dari Chambers menerangkan bahwa kemiskinan adalah suatu kesatuan konsep (integrated concept) yang memiliki lima dimensi, yaitu:

- a. Kemiskinan (Proper) Permasalahan kemiskinan seperti halnya pada pandangan semula adalah kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhankebutuhan pokok. Konsep atau pandangan ini berlaku tidak hanya pada kelompok yang tidak memiliki pendapatan, akan tetapi dapat berlaku pula pada kelompok yang telah memiliki pendapatan.
- b. Ketidakberdayaan (Powerless) Pada umumnya, rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial (social power) dari seseorang atau sekelompok orang terutama dalam memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- c. Kerentanan menghadapi situasi darurat (State of emergency) Seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tidak memiliki atau kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga di mana situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan untuk menyelesaikannya. Misalnya, situasi rentan berupa bencana alam, kondisi kesehatan yang membutuhkan biaya pengobatan yang relatif mahal, dan situasi-situasi darurat lainnya yang membutuhkan kemampuan pendapatan yang dapat

25 mencukupinya. Kondisi dalam kemiskinan dianggap tidak mampu untuk menghadapi situasi ini.

d. Ketergantungan (dependency) Keterbatasan kemampuan pendapatan ataupun kekuatan sosial dari seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tadi menyebabkan tingkat ketergantungan terhadap pihak lain adalah sangat tinggi. Mereka tidak memiliki kemampuan atau kekuatan untuk menciptakan solusi atau penyelesaian masalah terutama yang berkaitan dengan penciptaan pendapatan baru. Bantuan pihak lain sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan-persoalan terutama yang berkaitan dengan kebutuhan akan sumber pendapatan.

e. Keterasingan (Isolation) Dimensi keterasingan seperti yang dimaksudkan oleh Chambers adalah faktor lokasi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Pada umumnya, masyarakat yang disebut miskin ini berada pada daerah yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan sebagian besar fasilitas kesejahteraan lebih banyak terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti di perkotaan atau kota-kota besar. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh fasilitas-fasilitas kesejahteraan relatif memiliki taraf hidup yang rendah sehingga kondisi ini menjadi penyebab adanya kemiskinan.

2.3 Skema Terbentuknya Perangkap Kemiskinan

Skema terbentuknya kemiskinan yang didasarkan pada konsep yang dikemukakan oleh Chambers menerangkan bagaimana kondisi yang disebut miskin di

sebagian besar negara-negara berkembang dan dunia ketiga adalah kondisi yang disebut memiskinkan. Kondisi yang sebagian besar ditemukan bahwa kemiskinan selalu diukur/diketahui berdasarkan rendahnya kemampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok berupa pangan, kesehatan, perumahan atau pemukiman, dan pendidikan. Rendahnya kemampuan pendapatan diartikan pula sebagai rendahnya daya beli atau kemampuan untuk mengkonsumsi.

Kemampuan pendapatan yang relatif terbatas atau rendah menyebabkan daya beli seseorang atau sekelompok orang terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok menjadi rendah (Nugroho, 1995: 17). Konsumsi ini terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan gizi dan kesehatan standar. Akibatnya, kemampuan untuk mencapai standar kesejahteraan menjadi rendah seperti:

- a. Ketersediaan pangan tidak sesuai atau tidak mencukupi standar gizi yang disyaratkan sehingga beresiko mengalami mal gizi atau kondisi gizi rendah yang selanjutnya sangat rentan terhadap resiko penyaki menular.
- b. Kesehatan relatif kurang terjamin sehingga rentan terhadap serangan penyakit dan kemampuan untuk menutupi penyakit juga relatif terbatas sehingga sangat rentan terhadap resiko kematian.
- c. Perumahan atau pemukiman yang kurang/tidak layak huni sebagai akibat keterbatasan pendapatan untuk memiliki/mendapatkan lahan untuk tempat tinggal atau mendapatkan tempat tinggal yang layak. Kondisi ini akan berdampak mengganggu kesehatan.

d. Taraf pendidikan yang rendah. Kondisi ini disebabkan karena keterbatasan pendapatan untuk mendapatkan pendidikan yang diinginkan atau sesuai dengan standar pendidikan.

Kondisi-kondisi akibat keterbatasan atau rendahnya pendapatan di atas menyebabkan terbentuknya status kesehatan masyarakat yang dikatakan rendah (morbiditas) atau berada dalam kondisi gizi rendah. Kondisi seperti ini sangat rentan terhadap serangan penyakit dan kekurangan gizi yang selanjutnya disertai tingginya tingkat kematian (mortalitas). Angka mortalitas yang tinggi dan keadaan kesehatan masyarakat yang rendah akan berdampak pada partisipasi sosial yang rendah, ketidakhadiran yang semakin tinggi, kecerdasan yang rendah, dan ketrampilan yang relatif rendah. Berikut ini adalah penjelasan mengenai masing-masing keadaan yang disebabkan oleh adanya mortalitas maupun morbiditas yang tinggi.

1. Tingkat Partisipasi Sosial Yang Rendah Kondisi kesehatan maupun gizi yang rendah menyebabkan ketahanan fisik atau modal fisik yang diperlukan untuk partisipasi sosial menjadi rendah. Hal ini dikarenakan kesehatan yang terganggu tidak dapat menunjang partisipasi secara penuh baik di lingkungan kemasyarakatan maupun di lingkungan kerja. Sebagian besar golongan masyarakat miskin relatif jarang terlibat secara aktif dalam aktivitas sosial.
2. Absensi Meningkat Faktor kualitas kesehatan yang rendah tidak mendukung adanya aspek kehadiran dalam aktivitas kemasyarakatan baik di lingkungan sosial, pendidikan, maupun pekerjaan. Akibatnya, ketidakhadiran atau absensi dalam segala aktivitas menjadi semakin meningkat sehingga tidak

memiliki kesempatan untuk berperan secara aktif dalam lingkungan sosial tersebut.

3. **Tingkat Kecerdasan Yang Rendah** Faktor gizi buruk ataupun kualitas kesehatan yang rendah akan berdampak pada menurunnya kualitas intelektual. Seperti diketahui bahwa kinerja otak manusia yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah memerlukan gizi yang memadai atau ideal. Kekurangan gizi termasuk faktor yang paling utama terhadap adanya penurunan kualitas intelektual.
4. **Ketrampilan Yang Rendah** Pada prinsipnya, ketrampilan merupakan salah satu bentuk dari adanya kreativitas. Aktivitas ini harus ditunjang dengan kondisi kesehatan yang mencukupi dan tentunya adalah kualitas intelektual yang memadai. Masyarakat yang mengalami kekurangan gizi ataupun rentan terhadap gangguan kesehatan relatif sulit untuk mengembangkan ketrampilannya. Hal ini dikarenakan dukungan kesehatan untuk menunjang pengembangan kreativitas kerja relatif rendah sehingga tidak memiliki banyak kesempatan untuk meningkatkan kualitas ketrampilannya.

2.4. Bentuk dan Jenis Kemiskinan

Dimensi kemiskinan yang dikemukakan oleh Chambers memberikan penjelasan mengenai bentuk persoalan dalam kemiskinan dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kondisi yang disebut memiskinkan. Konsep kemiskinan tersebut memperluas pandangan ilmu sosial terhadap kemiskinan yang tidak hanya sekedar

kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhankebutuhan pokok, akan tetapi juga kondisi ketidakberdayaan sebagai akibat rendahnya kualitas kesehatan dan pendidikan, rendahnya perlakuan hukum, kerentanan terhadap tindak kejahatan (kriminal), resiko mendapatkan perlakuan negatif secara politik, dan terutama ketidakberdayaan dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan sendiri.

Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk permasalahan multidimensional, kemiskinan memiliki 4 bentuk. Adapun keempat bentuk kemiskinan tersebut adalah (Suryawati, 2004):

a. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Garis kemiskinan diartikan sebagai pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata untuk kebutuhan pokok berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk kemiskinan absolut ini paling banyak dipakai sebagai konsep untuk menentukan atau mendefinisikan kriteria seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin.

b. Kemiskinan Relatif

diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan

masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Daerah-daerah yang belum terjangkau oleh program-program pembangunan seperti ini umumnya dikenal dengan istilah daerah tertinggal.

c. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan Kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara moderen. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain.

d. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur diskriminatif.

Bentuk kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang paling banyak mendapatkan perhatian di bidang ilmu sosial terutama di kalangan negaranegara pemberi bantuan/pinjaman seperti Bank Dunia, IMF, dan Bank Pembangunan Asia. Bentuk kemiskinan struktural juga dianggap paling banyak menimbulkan adanya ketiga bentuk kemiskinan yang telah disebutkan sebelumnya (Jarnasy, 2004:

8-9).Setelah dikenal bentuk kemiskinan, dikenal pula dengan jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya. Adapun jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya adalah:

1. Kemiskinan Alamiah Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terbentuk sebagai akibat adanya kelangkaan sumber daya alam dan minimnya atau ketiadaan pra sarana umum (jalan raya, listrik, dan air bersih), dan keadaan tanah yang kurang subur. Daerah-daerah dengan karakteristik tersebut pada umumnya adalah daerah yang belum terjangkau oleh kebijakan pembangunan sehingga menjadi daerah tertinggal.
2. Kemiskinan buatan adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki banyak kesempatan untuk menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi secara merata. Kemiskinan seperti ini adalah dampak negatif dari pelaksanaan konsep pembangunan (developmentalism) yang umumnya dijalankan di negara-negara sedang berkembang. Sasaran untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi tinggi mengakibatkan tidak 32 meratanya pembagian hasil-hasil pembangunan di mana sektor industri misalnya lebih menikmati tingkat keuntungan dibandingkan mereka yang bekerja di sektor pertanian.

Kedua jenis kemiskinan di atas seringkali masih dikaitkan dengan konsep pembangunan yang sejak lama telah dijalankan di negara-negara sedang berkembang pada dekade 1970an dan 1980an (Jarnasy, 2004: 8). Persoalan kemiskinan dan

pembahasan mengenai penyebab kemiskinan hingga saat ini masih menjadi perdebatan baik di lingkungan akademik maupun pada tingkat penyusun kebijakan pembangunan (Suryawati, 2004: 123). Salah satu perdebatan tersebut adalah menetapkan definisi terhadap seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin. Pada umumnya, identifikasi kemiskinan hanya dilakukan pada indikator-indikator yang relatif terukur seperti pendapatan per kapita dan pengeluaran/konsumsi rata-rata. Ciri-ciri kemiskinan yang hingga saat ini masih dipakai untuk menentukan kondisi miskin adalah:

- a. Tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatan kerja, dan keterampilan yang memadai.
- b. Tingkat pendidikan yang relatif rendah
- c. Bekerja dalam lingkup kecil dan modal kecil atau disebut juga bekerja di lingkungan sektor informal sehingga mereka ini terkadang disebut juga setengah menganggur
- d. Berada di kawasan pedesaan atau di kawasan yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan regional atau berada pada kawasan tertentu di perkotaan (slum area)
- e. Memiliki kesempatan yang relatif rendah dalam memperoleh bahan kebutuhan pokok yang mencukupi termasuk dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai dengan standar kesejahteraan pada umumnya.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa ciri-ciri kemiskinan di atas tidak memiliki sifat mutlak (absolut) untuk dijadikan kebenaran universal terutama

dalam menerangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan ataupun terbentuknya kemiskinan. Sifat-sifat kemiskinan di atas hanya merupakan temuan lapangan yang paling banyak diidentifikasi atau diukur.

2.5. Indikator-Indikator Mengenai Kemiskinan

Pengukuran mengenai kemiskinan yang selama ini banyak dipergunakan didasarkan pada ukuran atas rata-rata pendapatan dan rata-rata pengeluaran masyarakat dalam suatu daerah. Perluasan pengukuran dengan menyertakan pandangan mengenai dimensi permasalahan dalam kemiskinan mengukur banyaknya individu dalam sekelompok masyarakat yang mendapatkan pelayanan atau fasilitas untuk kesehatan dan pendidikan. Beberapa perluasan pengukuran lainnya adalah menyertakan dimensi sosial politik sebagai referensi untuk menerangkan terbentuknya kemiskinan. Keseluruhan hasil pengukuran ini selanjutnya dikatakan sebagai indikator-indikator kemiskinan yang digolongkan sebagai indikator-indikator sosial dalam pembangunan. Adapun mengenai 34 beberapa indikator-indikator kemiskinan akan diuraikan pada sub sub bab berikut ini.

2.6 Indikator Kemiskinan Berdasarkan Dimensi Ekonomi

Berdasarkan sudut pandang ekonomi, kemiskinan adalah bentuk ketidakmampuan dari pendapatan seseorang maupun sekelompok orang untuk mencukupi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar. Dimensi ekonomi dari kemiskinan diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan seseorang baik secara finansial maupun jenis

kekayaan lainnya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Suryawati, 2004: 123). Dari pengertian ini, dimensi ekonomi untuk kemiskinan memiliki dua aspek, yaitu aspek pendapatan dan aspek konsumsi atau pengeluaran. Aspek pendapatan yang dapat dijadikan sebagai indikator kemiskinan adalah pendapatan per kapita, sedangkan untuk aspek konsumsi yang dapat digunakan sebagai indikator kemiskinan adalah garis kemiskinan.

1. **Pendapatan PerKapita** Pendapatan menyatakan besarnya rata-rata pendapatan masyarakat di suatu daerah selama kurun waktu 1 tahun. Besarnya pendapatan per kapita (income per capita) dihitung dari besarnya output dibagi oleh jumlah penduduk di suatu daerah untuk kurun waktu 1 tahun (Todaro, 1997: 437). Indikator pendapatan per kapita menerangkan terbentuknya pemerataan pendapatan yang merupakan salah satu indikasi 35 terbentuknya kondisi yang disebut miskin. Pendapatan per kapita dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Todaro, 1997: 437- 438):
$$Y_{Per\ Kapita} = \frac{Y_t}{P_{t}}$$

di mana: $Y_{Per\ Kapita}$ = Pendapatan per kapita Y_t = Pendapatan pada tahun t P_{t} = Jumlah penduduk pada tahun t
Variabel pendapatan dapat dinyatakan sebagai Produk Domestik Bruto (PDB), Pendapatan Nasional, atau Produk Domestik Regional Bruto, sedangkan jumlah penduduk menyatakan banyaknya penduduk pada periode t di suatu daerah yang diukur pendapatan per kapitanya.
2. **Garis Kemiskinan** Garis kemiskinan merupakan salah satu indikator kemiskinan yang menyatakan rata-rata pengeluaran makanan dan non-makanan per kapita

pada kelompok referensi (reference population) yang telah ditetapkan (BPS, 2004). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marjinal, yaitu mereka yang hidupnya dikategorikan berada sedikit di atas garis kemiskinan. Berdasarkan definisi dari BPS, garis kemiskinan dapat diartikan sebagai batas konsumsi minimum dari kelompok masyarakat marjinal yang berada pada referensi pendapatan sedikit lebih besar daripada pendapatan terendah. Pada prinsipnya, indikator garis kemiskinan mengukur kemampuan pendapatan dalam memenuhi 36 kebutuhan pokok/dasar atau mengukur daya beli minimum masyarakat di suatu daerah. Konsumsi yang dimaksudkan dalam garis kemiskinan ini meliputi konsumsi untuk sandang, pangan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan (Suryawati, 2004: 123).

2.7 Indikator Kemiskinan Berdasarkan Dimensi Peran Pemerintah

Pemerintah

Sebagai regulator sekaligus dinamisator dalam suatu perekonomian merupakan salah satu pihak yang memiliki peran sentral dalam upaya untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan. Di Indonesia, pelaksanaan penanggulangan permasalahan kemiskinan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan yang bekerja sama dengan Departemen Kesehatan dan Departemen Sosial. Program penanggulangan masalah kemiskinan ini dibiayai melalui Anggaran Pembangunan dan Belanja Nasional (APBN) melalui pos pengeluaran untuk Program Pembangunan. Prinsip yang digunakan untuk program ini bahwa penanggulangan

kemiskinan dilakukan melalui upaya untuk meningkatkan pembangunan di bidang sumber daya manusia dan pemenuhan sarana maupun pra sarana fisik. Kedua bentuk pelaksanaan dalam APBN ini disebut juga investasi pemerintah untuk sumber daya manusia dan investasi pemerintah di bidang fisik. .

2.8 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin

Pada sub bab sebelumnya telah dibahas mengenai terbentuknya kemiskinan dan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang ataupun sekelompok orang (masyarakat) menjadi miskin. Pemikiran sosial saat ini lebih banyak memfokuskan penyebab kemiskinan pada faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi jumlah penduduk miskin yang terdapat di suatu daerah. Faktor-faktor tersebut merupakan dimensi dari kesejahteraan atau kemiskinan yang selanjutnya dijadikan sebagai faktor yang menciptakan besarnya penduduk miskin (Saleh, 2002: 88-89). Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin di suatu daerah diterangkan sebagai berikut.

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Pada prinsipnya, PDRB per kapita merupakan konsep dari pendapatan per kapita yang diimplementasikan penjelasannya pada lingkup regional/daerah. Besarnya pendapatan per kapita di suatu daerah mencerminkan aspek pemerataan pendapatan dengan menggunakan besarnya nilai rata-rata keseluruhan pendapatan rumah tangga dalam perekonomian daerah. Pendapatan per kapita menggambarkan kemampuan rata-rata pendapatan masyarakat di suatu daerah. Konsep pendapatan per kapita

seperti ini dianggap masih relevan untuk menerangkan terbentuknya jumlah penduduk miskin di daerah tersebut. Apabila pendapatan per kapita meningkat, maka kemampuan rata-rata pendapatan masyarakat di suatu daerah akan semakin meningkat. Ini berarti kemampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok di daerah tersebut juga akan semakin meningkat. Jika kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok meningkat, maka jumlah penduduk miskin di daerah tersebut akan berkurang. Sebaliknya, apabila pendapatan per kapita di daerah berkurang/menurun, maka akan menurun pula kemampuan pendapatan rata-rata masyarakat di daerah tersebut. Jika kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok menurun, maka jumlah penduduk miskin di daerah tersebut akan meningkat. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka PDRB per kapita berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin.

2. Pengeluaran Pemerintah Untuk Pembangunan Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan merupakan faktor penentu jumlah penduduk miskin yang berasal dari sisi pendekatan anggaran pemerintah (Saleh, 2002). Pengeluaran tersebut meliputi keseluruhan 41 pengeluaran untuk program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk di suatu daerah. Semakin tinggi pengeluaran pemerintah untuk pembangunan, maka akan semakin tinggi pula taraf kesejahteraan yang dapat dicapai atau diperoleh penduduk di suatu daerah.
3. Angka Melek Huruf (AMH) Salah satu indikator kesejahteraan di bidang pendidikan adalah indikator jumlah penduduk yang dinyatakan melek huruf.

Indikator ini mencerminkan kemampuan penduduk di suatu daerah untuk mengakses fasilitas, layanan pemerintahan, dan sarana lainnya yang membutuhkan kemampuan untuk bisa membaca dan menulis, termasuk di antaranya adalah persyaratan dalam mencari kerja (Suryawati, 2004). Semakin tinggi jumlah penduduk yang melek huruf, maka akan semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk mengakses fasilitas maupun sarana untuk dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya.

4. Jumlah Penduduk Yang Tidak Mendapatkan Akses Air Bersih (RPA) Air bersih atau air minum merupakan salah satu sarana publik yang cukup vital, sehubungan dengan manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik individu maupun keluarga (Harahap, 2006). Akses terhadap air bersih atau air minum akan menentukan kemampuan penduduk untuk mencukupi kebutuhan pokoknya yang terdiri atas kebutuhan atas makanan dan minuman, serta kebutuhan lain yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan. Semakin tinggi jumlah penduduk yang tidak mendapatkan akses atas air bersih, maka akan semakin tinggi pula jumlah penduduk miskin di daerah tersebut.
5. Jumlah Penduduk Yang Tidak Mendapatkan Akses Fasilitas Kesehatan Fasilitas kesehatan merupakan salah satu fasilitas publik yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan (Saleh, 2002). Fasilitas kesehatan sekarang ini tidak hanya berfungsi untuk memberikan layanan kesehatan, akan tetapi berperan pula untuk memberikan perbaikan gizi keluarga. Layanan kesehatan akan memberikan pencegahan dan pengobatan atas penyakit atau gangguan medis, sehingga akan

mampu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Semakin tinggi jumlah penduduk yang tidak mendapatkan akses fasilitas kesehatan, maka akan semakin tinggi resiko penularan penyakit ataupun gizi buruk yang selanjutnya akan menjadi penyebab tingginya angka kematian dan buruknya kesehatan ibu dan bayi.

Mengenai daerah pemekaran baru dan keterkaitannya dengan jumlah penduduk miskin dijelaskan sebagai faktor kesejahteraan yang disebabkan adanya perubahan pada pengembangan administrasi wilayah (TMPK, 2005). Daerah pemekaran baru akan mengubah struktur administrasi atas pengaturan wilayah dan jumlah penduduk yang menempati suatu wilayah lama dan wilayah pemekaran baru. Ada dua pandangan, terkait dampak dari pemekaran wilayah baru terhadap jumlah penduduk miskin, yaitu (Suwandi, 2002).

penduduk akan berdampak pula pada komposisi jumlah penduduk berdasarkan indikator sosialnya, seperti jumlah penduduk miskin, jumlah penduduk usia sekolah, jumlah penduduk yang tidak mendapatkan akses air bersih, dan jumlah penduduk yang tidak mendapatkan fasilitas kesehatan. Saleh (2002) menerangkan bahwa konsentrasi kemiskinan di suatu daerah ditentukan pula oleh aspek regional seperti pemusatan jumlah penduduk miskin yang tidak menyebar di suatu daerah (tingkat kecamatan).

Perubahan Pada Kebijakan Kesejahteraan Setiap daerah pemekaran di tingkat kabupaten/kota akan mendapatkan fasilitas dan kewenangan yang sama dengan daerah lainnya di tingkat kabupaten/kota. Salah satu kewenangan adalah pelimpahan wewenang untuk mengelola kebijakan, terutama kebijakan yang berorientasi untuk meningkatkan taraf kesejahteraan (Suwandi, 2002). Pelimpahan wewenang ini termasuk salah satunya adalah adanya tambahan alokasi dana dari pemerintah pusat yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan. Daerah pemekaran baru memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan, dibandingkan dengan daerah lain yang tidak mengalami pemekaran.

2.9 Mengenai Pemekaran Wilayah

Aspek kemiskinan dalam penelitian ini dikaitkan dengan aspek pemekaran wilayah yang sekaligus menjadi bagian penyelenggaraan otonomi daerah sejak tahun 2001. Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pemekaran wilayah adalah pembentukan wilayah administratif baru, baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota dari daerah induknya (Kuncoro, 2004). Terkait pelaksanaan otonomi daerah, pemekaran wilayah sebenarnya sudah bisa dilaksanakan terhitung sejak dikeluarkannya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Prinsip dalam kemandirian daerah yang difokuskan pada daerah tingkat kabupaten/kota diharapkan akan mampu mengoptimalkan sumber-

sumber penerimaan daerah yang dapat digunakan untuk membiaya pembangunan di daerah tersebut.

Suwandi (2002) menerangkan bahwa pemekaran wilayah, terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah akan berdampak pada data jumlah penduduk miskin di suatu daerah. Pembentukan wilayah administrasi baru tersebut akan merubah struktur kependudukan, baik pada aspek jumlah penduduk maupun jumlah penduduk miskin di daerah pemekaran maupun di daerah induknya. Setelah pemekaran wilayah, jumlah penduduk di daerah induk akan berkurang sebesar daerah pemekaran baru. Jika terdapat perubahan pada struktur kependudukan, maka sebagai akibat pemekaran wilayah pun akan berdampak pada perubahan jumlah penduduk miskin, baik pada daerah induk maupun daerah pemekaran baru (Darumurti dan Rauta, 2003).

3.0. Kerangka Teoritik Penelitian Dalam memahami permasalahan

Kemiskinan yang bersifat multidimensional tersebut, perlu dimengerti terlebih dahulu definisi mengenai kemiskinan itu sendiri. Pada awalnya, definisi mengenai kemiskinan lebih banyak mengartikannya sebagai bentuk ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok (Todaro, 1997). Kegagalan konsep pembangunan mendorong pemahaman mengenai kemiskinan terutama di negara-negara sedang berkembang mulai diperluas hingga pada aspek-aspek yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Dalam hal ini, penyebab kemiskinan memiliki dimensi yang cukup luas meliputi aspek sosial, budaya, politik, lingkungan (alam dan geografis), kesehatan, pendidikan, agama, dan budi pekerti. Bentuk kemiskinan

multidimensional inilah yang selanjutnya juga diterangkan sebagai faktor-faktor yang memiskinkan (Suryawati, 2005).

Salah satu konsep atau pemikiran mengenai kemiskinan yang cukup populer adalah konsep dari Chamber (Saleh 2002). Teori kemiskinan dari Chamber ini dilandasi oleh adanya kesenjangan antara bentuk perekonomian perkotaan (urban) dan pedesaan (rural) yang selanjutnya menjadikan adanya kesenjangan berupa perbedaan standar hidup/kesejahteraan. Teori Chamber ini kemudian semakin berkembang dengan adanya bentuk pemikiran mengenai kemiskinan di perkotaan (urban poverty) dan kemiskinan di pedesaan (rural poverty). Kemiskinan baik di perkotaan maupun di pedesaan memiliki pokok permasalahan yang saling berkaitan, yaitu urbanisasi atau perpindahan/migrasi penduduk dari desa menuju ke kota.

Rendahnya taraf kesejahteraan di desa mendorong adanya perpindahan atau migrasi sumberdaya dari desa menuju ke kota (Harahap, 2006). Keterbatasan sektor-sektor formal di perkotaan dalam menyerap sumberdaya ditambah dengan adanya kesenjangan ketrampilan/kemampuan teknis masyarakat dari pedesaan menyebabkan sebagian besar dari penduduk yang bermigrasi tersebut bekerja di sektor informal atau menjadi pengangguran baru di perkotaan. Daya tampung lahan di perkotaan yang relatif terbatas menyebabkan sebagian besar dari mereka lebih banyak menempati kawasan-kawasan yang tidak layak huni.

Fenomena kemiskinan seperti ini mulai banyak terlihat ketika konsep pembangunan mulai banyak diterapkan di negara-negara sedang berkembang. Pada prinsipnya, kemiskinan perkotaan memiliki pemahaman yang sama dengan pemahaman mengenai kemiskinan itu sendiri, yaitu faktor-faktor yang memiskinkan (Suryawati, 2004).

Bentuk kemiskinan struktural yang dikembangkan dari pemikiran/teori Chamber ini menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menjadikan kemiskinan atau faktor-faktor yang memiskinkan seperti masalah rendahnya taraf pendidikan dan rendahnya kualitas kesehatan yang keseluruhannya menyebabkan kualitas hidup menjadi rendah. Pemerintah juga merupakan salah satu faktor yang mampu mempengaruhi tingkat kemiskinan di suatu daerah melalui kebijakan/program penanggulangan kemiskinan termasuk pula adanya pelaksanaan proyek fisik. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin di suatu daerah.

Faktor-faktor penentu tersebut di antaranya terbagi atas faktor makroekonomi, faktor anggaran pemerintah, dan indikator-indikator kesejahteraan. Adapun mengenai hubungannya dengan tingkat kemiskinan atau jumlah penduduk miskin adalah:

1. PDRB Per Kapita PDRB per kapita di suatu daerah mencerminkan rata-rata kemampuan pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhannya terutama kebutuhan-kebutuhan pokok. Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat merupakan salah satu indikasi kesejahteraan yang berasal dari aspek pemerataan pendapatan masyarakat di daerah. Tingkat kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan aspek kemampuan pendapatan, akan tetapi juga berkenaan dengan pemerataan pendapatan masyarakat di suatu daerah (Todaro, 1997).

2. **Pengeluaran Pemerintah Untuk Pembangunan (PPP)** Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan merupakan faktor penerntu jumlah penduduk miskin yang berasal dari sisi pendekatan anggaran pemerintah (Saleh, 2002). Pengeluaran tersebut meliputi keseluruhan pengeluaran untuk program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk di suatu daerah. Semakin tinggi pengeluaran pemerintah untuk pembangunan, maka akan semakin tinggi pula taraf kesejahteraan yang dapat dicapai atau diperoleh penduduk di suatu daerah.
3. **Angka Melek Huruf (AMH)** Salah satu indikator kesejahteraan di bidang pendidikan adalah indikator jumlah penduduk yang dinyatakan melek huruf. Indikator ini 48 mencerminkan kemampuan penduduk di suatu daerah untuk mengakses fasilitas, layanan pemerintahan, dan sarana lainnya yang membutuhkan kemampuan untuk bisa membaca dan menulis, termasuk di antaranya adalah persyaratan dalam mencari kerja (Suryawati, 2004). Semakin tinggi jumlah penduduk yang melek huruf, maka akan semakin tinggi pula

kemampuan masyarakat untuk mengakses fasilitas maupun sarana untuk dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya.

4. Jumlah Penduduk Yang Tidak Mendapatkan Akses Air Bersih (RPA) Air bersih atau air minum merupakan salah satu sarana publik yang cukup vital, sehubungan dengan manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik individu maupun keluarga (Harahap, 2006). Akses terhadap air bersih atau air minum akan menentukan kemampuan penduduk untuk mencukupi kebutuhan pokoknya yang terdiri atas kebutuhan atas makanan dan minuman, serta kebutuhan lain yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan. Semakin tinggi jumlah penduduk yang tidak mendapatkan akses atas air bersih, maka akan semakin tinggi pula jumlah penduduk miskin di daerah tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Swasta Bandung jln. Pengabdian No.14, Bandar setia, Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara 20371, Indonesia.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada tahun pembelajaran 2017/2018 yaitu 3 bulan setelah seminar proposal.

Tabel 3.1

WAKTU PENELITIAN

No.	Jenis Kegiatan	Bulan/ Minggu																								
		Oktober				November				Desember				Januari				Februari				Maret				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Pengajuan Judul			■	■																					
2.	Penulisan Proposal					■																				
3.	Bimbingan Proposal						■	■	■	■																
4.	Seminar Proposal										■	■														
5.	Riset											■	■													
6.	Pengolahan Data													■	■											
7.	Pembuatan Skripsi															■	■	■	■							
8.	Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■					
9.	Pengesahan Skripsi																						■			
10.	Sidang Meja Hijau																								■	■

B. Subjek dan Objek

A. Subjek

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian yaitu kepala sekolah, guru wali kelas, dan guru bimbingan dan konseling yang berada di Sekolah Menengah Atas Pada Siswa Kelas IX SMP Swasta Bandung

B. Objek

Objek penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tujuannya untuk menganalisis fenomena atau kejadian, maka pengambilan sampelnya

tidak ditentukan seperti penelitian kuantitatif. Oleh sebab itu peneliti mengambil 3 orang siswa dari kelas IX SMP Swasta Bandung.

Menurut Sugiyono (2012:118) menyatakan bahwa “ sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu “.

Teknik pengambilan sampel atau objek penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampel* (*Sampel Bertujuan*) yaitu sampel bertujuan atau sampel yang diambil secara sengaja dipilih oleh peneliti karena dianggap memiliki ciri-ciri tertentu yang dapat memperkaya data peneliti. Total populasi 71 orang siswa, maka peneliti mengambil sampel atau objek berdasarkan siswa yang mengalami masalah perilaku terlambat datang ke sekolah dari setiap kelas sehingga total sampel keseluruhan adalah 30 orang siswa. Seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2

Objek Penelitian

No	Kelas	Jumlah Siswa	Jumlah Objek
1	IX – 1	22 Siswa	10 Siswa
2	IX – 2	25 siswa	10 siswa
3	IX – 3	24 siswa	10 siswa
Jumlah		71 Siswa	30 Siswa

C. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat satu variabel penelitian, yaitu penerapan konseling individual melalui teknik *Behavioral* untuk mengurangi perilaku terlambat siswa.

D. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Setelah mengidentifikasi variabel penelitian, maka dapat dirumuskan definisi operasional variabel penelitian sebagai berikut :

1. **Konseling individual** : adalah suatu proses pemberian bantuan yang diberikan seorang ahli (konselor) kepada individu (klien) bermasalah secara langsung tatap muka dengan tujuan agar terentaskannya masalah individu tersebut. Teknik *Behavioral* merupakan proses tingkah laku yang diharapkan menghasilkan perubahan yang nyata dalam perilaku konseling dan diusahakan dalam proses

belajar, kemudian belajar kembali yang berlangsung selama proses konseling dan dipandang sebagai proses belajar.

2. Prilaku terlambat adalah perbuatan atau kegiatan yang dilakukan secara berlahan-lahan sehingga tidak sesuai dengan waktu atau lewat dari waktu yang telah ditentukan.

E. Teknik Pengumpulan Data atau Instrumen Penelitian

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian ini digunakan alat atau instrumen yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Sebelum melakukan penelitian, peneliti mengobservasi siswa untuk melihat permasalahan yang ada pada siswa disekolah. Pada kegiatan penelitian, peneliti mengobservasi kegiatan siswa yang direkomendasikan menjadi sampel penelitian guna mengetahui Pemberian Layanan Informasi untuk Meningkatkan Motivasi Ekonomu Kurang Mampu untuk Melanjutkan Studi Sekolah Menengah Atas Pada siswa Kelas IX SMP Swasta Bandung Tahun Pembelajaran 2017/2018.

Menurut Sugiyono (2008: 166) mengemukakan bahwa “ observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan sejumlah pertanyaan khusus secara tertulis “.

2. Wawancara

Menurut Sugiono (2009:157) “ wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil “. Maka peneliti melakukan wawancara dengan kepala sekolah, wali kelas, guru bimbingan dan konseling, dan siswa yang sering terlambat datang kesekolah.

Sedangkan menurut Subana, (2009:29) “ wawancara adalah instrumen pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya “. Ada beberapa faktor yang akan memengaruhi arus informasi dalam wawancara yaitu : pewawancara, responden, pedoman wawancara dan situasi wawancara.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku , surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda serta foto-foto. Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk melengkapi data dari hasil observasi dan wawancara. Hanya saja dokumentasi dalam penelitian ini memakai foto-foto dengan guru bimbingan dan konseling, wali kelas, catatan guru bimbingan dan konseling dan staf pengajar lainnya.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, analisis data yang telah ditemukan sejak pertama penelitian datang kelokasi penelitian yang dilaksanakan secara intensif sejak awal pengumpulan data lapangan sampai akhir data terkumpul semua. Analisis data, dipakai untuk memberikan arti dari data-data yang telah dikumpulkan. Analisis data merupakan proses pengaturan urutan data, mengorganisasikan dalam suatu pola dan ukuran untuk dijadikan suatu kesimpulan, jadi analisis berdasarkan pada data yang telah diperoleh dari penelitian yang sifatnya terbuka.

Berdasarkan uraian diatas, maka prosedur analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu.

2. Penyajian Data

Data disajikan dapat berupa uraian singkat, bagan , hubungan antar kata gori. Flow chart dan sejenisnya. Adapun dalam penelitian ini data disajikan dalam bentuk deskriptif atau naratif.

3. Pengambilan Kesimpulan

Peneliti menarik kesimpulan dari data yang telah diperoleh dan dikelompokkan. Dalam hal ini akan tergantung pada kemampuan peneliti dalam: 1) merinci fokus masalah yang benar-benar menjadi pusat perhatian untuk telaah secara mendalam, 2) melacak, mencatat, mengorganisasikan setiap data yang relevan untuk masing-masing fokus masalah yang telah ditelaah, 3) menyatakan apa yang telah dimengerti secara utuh tentang suatu masalah yang diteliti.

Data awal yang berwujud kata-kata dan tingkah laku informan penelitian yang terkait dengan penerapan konseling individual melalui teknik *Behavioral* untuk mengurangi perilaku terlambat siswa di Sekolah Menengah Atas Pada Siswa Kelas IX SMP Swasta Bandung

Sampai diperoleh hasil observasi dan wawancara seluruh dokumen, selanjutnya direduksi dan disimpulkan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Data SMP SWASTA BANDUNG BANDAR SETIA

Keadaan guru pembimbing atau Konselor SMP SWASTA BANDUNG

Tabel 4.1

Data Guru Pembimbing

No	Nama Guru	Pendidikan	Siswa Asuh/Jumlah
1.	Drs. Parulian Dongoran	S1 Bimbingan Konseling	Seluruh siswa SMP SWASTA BANDUNG

2. Identitas Sekolah

- a. Nama Sekolah : SMP SWASTA BANDUNG
- b. Alamat sekolah : Jl. Pengabdian No 72
- c. Desa/kelurahan/kecamatan : Desa Bandar Setia, Kec. Percut Sei Tuan
- d. Tahun Didirikan Sekolah : 1986-1987
- e. Nama kepala sekolah : Paisal Lubis S.Pd
- f. No telp/hp kepala sekolah : 085261607474

3. Tujuan SMP SWASTA BANDUNG

a. Tujuan Jangka Panjang

- 1. guru aktif melakukan tugas dalam proses pembelajaran dengan berbagai

2. metode pembelajaran yang menyenangkan
3. pembelajaran terlakukan sesuai dengan yang telah diprogramkan
4. melakukan penilaian berbasis kelas
5. melaksanakan program remedial dan pengayaan
6. mencapai 90% ketuntasan belajar siswa dengan KKM yang telah ditetapkan

b. Tujuan Jangka Pendek

1. pembelajaran dapat berlangsung dengan menggunakan berbagai metode
2. dapat meningkatkan kompetensi dengan prestasi siswa
3. rata-rata nilai UN meningkatkan 0.5 setiap tahun
4. memperoleh penghargaan dalam bidang seni dan olahraga

4. Keadaan Sarana dan Prasarana SMP SWASTA BANDUNG

Setelah satu faktor yang mendukung keberhasilan sebuah lembaga pendidikan adalah fasilitas yang memadai dan untuk mewujudkan siswa yang berkualitas harus didukunh sarana dan prasarana yang baik dan lengkap. Sebagaimana dapat dilihat dari table berikut :

Tabel 4.2

Sarana dan Prasarana

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Ruang kepala sekolah	1	permanen
2	Ruang kelas	10	permanen
3	Ruang guru	1	permanen

4	Ruang tata usaha	1	permanen
5	Ruang BK	1	permanen
6	Perpustakaan	1	permanen
7	Laboratorium	1	permanen
8	Lab. Komputer	1	permanen
9	Lab. IPA	1	permanen
10	Ruang UKS	1	Permanen
11	Kantin	1	Permanen
12	Toilet	2	Permanen

a. Fasilitas

1. Futsal
2. Sepak bola
3. Voli
4. Badminton

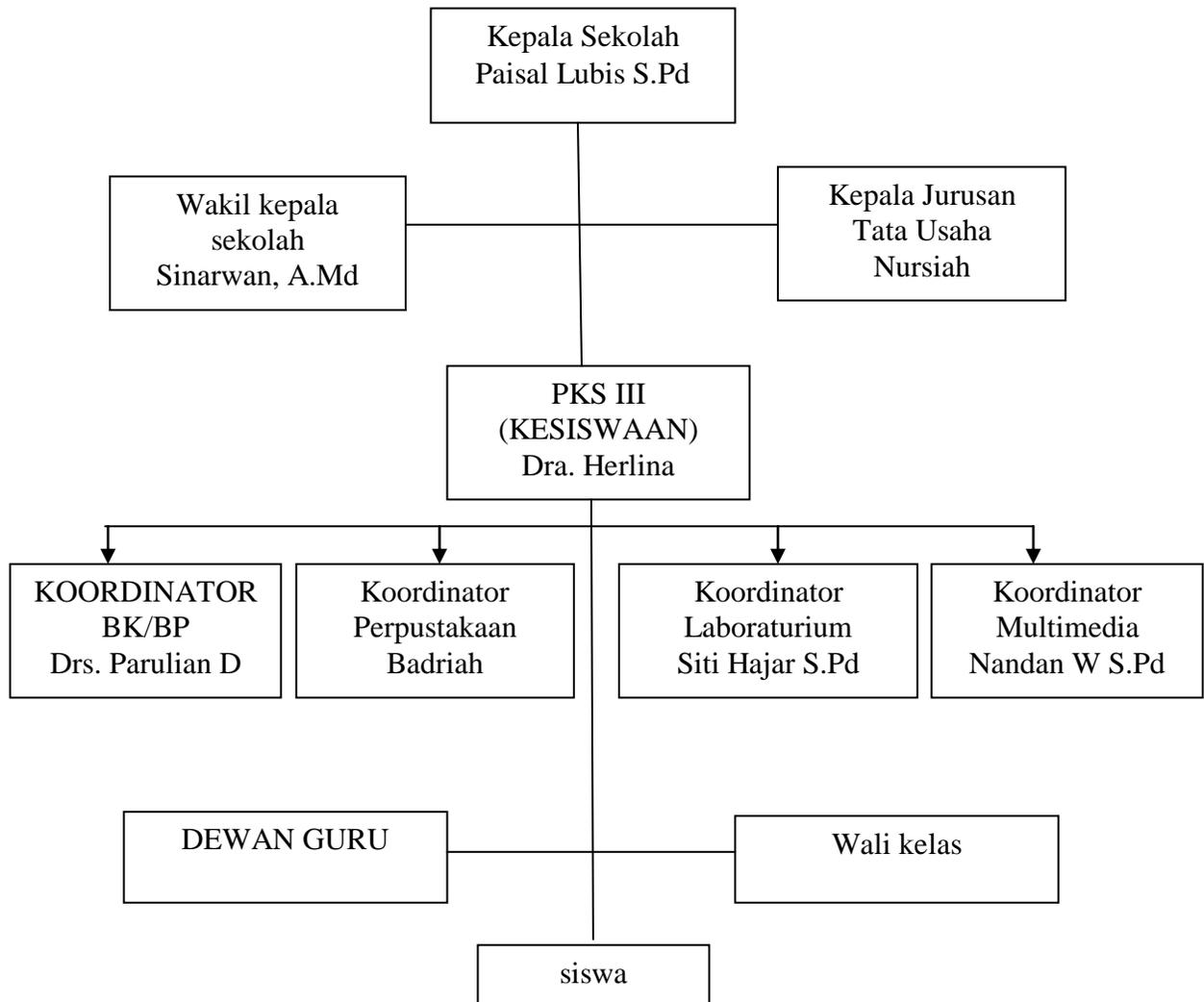
5. Struktur Organisasi Sekolah

Disekolah SMP ini, disusun dengan organisasi yang terorganisasi dengan baik.

Berikut adalah struktur organisasi di SMP SWASTA BANDUNG

Gambar 4.3

Struktur Organisasi SMP SWASTA BANDUNG



Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan sarana dan prasarana yang dimiliki SMP SWASTA BANDUNG Bandar Setia telah sesuai dengan kebutuhan belajar mengajar.

Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan mampu mendukung proses pendidikan yang berlangsung di sekolah, sehingga mampu mewujudkan tujuan pendidikan yang berkualitas disekolah secara efektif dan efisien.

6. Keadaan Guru SWASTA BANDUNG

Guru merupakan suri tauladan (panutan) bagi setiap muridnya Guru juga harus bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohani agar mencapai kedewasaanya. Guru melaksanakan kegiatan dalam belajar untuk mencapai suatu tujuan pendidikan.

Tabel 4.3

Data Guru di SMP SWASTA BANDUNG

No.	Jenis kelamin	Jabatan	Jumlah	Status Guru
1	L	Kepala Sekolah	1	Tetap
2	L	Wakil K. Sekolah	1	Tetap
3	P	Bendahara	1	Tetap
4	P	Guru Mata Pelajaran	11	Tetap
5	L	Guru Mata Pelajaran	10	Tetap
6	P	Staf Tata Usaha	2	Tetap
7	L	Penjaga Sekolah	1	Tetap
8	L	Satpam	1	Tetap

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan di SMP SWASTA BANDUNG Tahun Pembelajaran 2017/2018 yang bertempat di Jln. Pengabdian No. 72 Kecamatan Percut Sei Tuan, Sumatera Utara. Yang menjadi objek penelitian ini adalah 30 siswa dari 3 kelas dengan jumlah 101 siswa. Sebelum melakukan penelitian peneliti terlebih dahulu melakukan observasi disekolah. Penelitian ini menggunakan layanan informasi.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan didapatkan hasil bahwa ada beberapa siswa yang memiliki ekonomi yang rendah dan bahkan mempertimbangkan untuk melanjutkan biaya ke Sekolah Menengah Atas (SMA) , siswa masih ada yang tidak termotivasi untuk melanjutkan pendidikan lebih lanjut, bisa mengendalikan diri ketika layanan diberikan, masih terdapat siswa yang merasa dirinya hanya bisa mendapatkan pendidikan di SMP saja.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan guru Bimbingan Konseling dapat disimpulkan bahwa guru Bimbingan Konseling telah melaksanakan tugasnya dan perannya sebagai guru Bimbingan Konseling sesuai dengan ilmu dan kemampuan yang dimilikinya, peneliti mendapat hasil yang disimpulkan bahwa kepala sekolah mendukung penuh setiap kegiatan Bimbingan Konseling yang dilakukan oleh guru Bimbingan Konseling kepada siswa kelas XI di SMP SWASTA BANDUNG. Namun guru Bimbingan Konseling belum pernah memberikan layanan informasi tentang meningkatkann motivasi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke

SMA, sehingga masih terdapat siswa yang tidak termotivasi untuk melanjutkan pendidikan walaupun hanya dengan ekonomi yang rendah.

a. Deskripsi Hasil Observasi Siswa

Berdasarkan observasi terlampir yang peneliti lakukan dengan para siswa terdapat 30 siswa di SMP SWASTA BANDUNG yaitu mengenai permasalahan kurangnya termotivasi untuk melanjutkan pendidikan, yakni siswa merasa pendidikannya hanya sampai di SMP saja, siswa tidak ingin merepotkan kedua orang tuanya, terdapat beberapa siswa berjuang untuk mendapatkan beasiswa.

b. Deskripsi Hasil Wawancara Guru Bimbingan Konseling

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan guru bimbingan konseling dapat dimengerti bahwa guru bimbingan konseling telah melaksanakan tugas dan perannya sebagai guru bimbingan konseling dengan pengetahuan dan kemampuan yang telah dimilikinya. Namun guru bimbingan konseling belum pernah melakukan layanan informasi siswa-siswinya terutama menggunakan layanan bimbingan kelompok mengenai meningkatkan motivasi ekonomi kurang mampu untuk melanjutkan ke SMA. Guru bimbingan konseling lebih mengutamakan layanan konseling individual di ruang BK, sehingga sebagian siswa belum mengerti apa layanan informasi oleh karena itu ada siswa yang masih bersikap tidak peduli dengan diberikan materi memotivasi ekonomi kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan.

c. Deskripsi Hasil Wawancara Wali Kelas

Setelah dilakukan wawancara dengan siswa, guru bimbingan konseling dan sekarang hasil wawancara dengan wali kelas. Berdasarkan wawancara terlampir yang

peneliti lakukan dengan wali kelas dapat disimpulkan bahwa setiap wali kelas selalu memperhatikan dan memantau segala perilaku siswa, masalah-masalah yang dialami siswa dan semua tindakan siswa di dalam sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan wali kelas pada umumnya siswa sudah mulai memikirkan pilihan lanjutan pendidikan, siswa sudah mampu berjanji untuk giat dalam mencapai beasiswa agar dipermudahnya pendidikan lanjutan. Para siswa lebih mematuhi guru bimbingan konseling dan wali kelas akan tetapi wali kelas tetap memberikan arahan bahwa dengan giat belajar akan menapatkan beasiswa yang mempermudah pendidikan.

1. Pemberian Layanan Informas Untuk Meningkatkan Motivasi Kurang Mampu Untuk Melanjutkan Pendidikan Ke Sma Pada Siswa Kelas Ix Smp Swasta Bandung

Konseling sangat dibutuhkan dalam membantu memecahkan konflik dalam bentuk masalah siswa. Cara berkomunikasi guru dengan siswa harus bisa menciptakan suasana harmonis, menghindari sikap formalitas yang justru dapat menghambat bagi kelancaran terlaksananya layanan bimbingan kelompok. Keterampilan guru bimbingan konseling dapat merubah sikap siswa sekaligus mampu menjadi teman bagi siswa.

Disinilah peran aktif bagi guru bimbingan konseling dalam memberikan layanan kepada siswa yang mengalami masalah dalam meningkatkan motivasi kurang mampu untuk melanjutkan ke SMA. Layanan yang diberikan guru bimbingan konseling seperti layanan informasi.

Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup (Nugroho, 1995). Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya (Suryawati, 2004).

Layanan informasi dapat diselenggarakan melalui ceramah, Tanya jawab, dan diskusi yang dilengkapi dengan peragaan. Selebaran, tayangan foto, film atau video, kunjungan keperusahaan-perusahaan. Berbagai narasumber, baik dari sekolah sendiri, atau dari sekolah lain, dari lembaga-lembaga pemerintahan, maupun dari berbagai kalangan dimasyarakat dapat diundang guna memberikan informasi kepada peserta didik. Namun perlu diingat bahwa semua kegiatan hendaknya direncanakan secara matang. Layanan informasi dapat dilaksanakan secara individual, klasikal dan ataupun diselenggarakan secara umum. Dapat juga diberikan secara lisan seperti jurnal, majalah dan leaflet.

Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL)

Format Individual

I. IDENTITAS

1. Satuan pendidikan : SMP Swasta Bandung
2. Tahun pembelajaran : 2017/2018
3. Sasaran pelayanan : layanan informasi
4. Pelaksanaan : calon konselor
5. Pihak terkait : guru bimbingan konseling

II. WAKTU DAN TEMPAT

1. Tanggal : 20 Februari 2018
2. Waktu pelayanan : dijadwalkan oleh guru bimbingan konseling
3. Volume waktu : 1 x 40 menit
4. Tempat pelayanan : ruang kelas IX

III. TUGAS PERKEMBANGAN : Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan untuk mengikuti dan melanjutkan pelajaran dan atau mempersiapkan diri serta peran dalam kehidupan masyarakat.

IV. TUJUAN/ARAH PENGEMBANGAN

1. Pengembangan KES:
 - a. Peserta didik memiliki pemahaman baru tentang motivasi ekonomi kurang mampu untuk pendidikan lanjutan

- b. Peserta didik merasa senang ketika diberikannya layanan informasi
- c. Peserta didik memiliki komitmen untuk belajar lebih giat agar mendapatkan beasiswa yang mempermudah pendidikan.

2. Penanganan KES-T:

- a. Untuk memecahkan permasalahan konseli dengan menambah pengetahuan atau kompotensinya atas permasalahan yang dihadapi.
- b. Memberikan dorongan agar dirinya mampu melakukan komitmen.

V. JENIS LAYANAN DAN KEGIATAN PENDUKUNG

- 1. Jenis layanan : Konseling Individual
- 2. Kegiatan pendukung : Aplikasi Instrumentasi (AUM UMUM)

VI. SARANA

- 1. Alat : kertas, pensil dan buku

VII. SASARAN PENILAIAN HASIL LAYANAN

Diperoleh hal-hal baru olehpeserta didik tentang meningkatkan motivasi ekonomi kurag mampu yang menjadi masalah sesuai dengan diri dan kepribadian konseli.

A. KES

- 1. Acuan (A) : teknik konseling yang sesuai dengan pendidikan
- 2. Kompotensi (K) : peserta didik memiliki paham baru tentang sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan yang dialami

3. Usaha (U) : apa yang akan dilakukan konseli setelah berakhirnya proses konseling
 4. Rasa (R) : perasaan yang dirasakan konseli setelah berakhirnya konseling
 5. Sungguh-sungguh : itikad dari konseli untuk menjalankan apa yang akan dilakukannya untuk dilaksanakan
- B. Penanganan KES-T, yakni terhindarnya konseli dari kehidupan sehari-hari yang terganggu, dalam hal ini :
1. Mengabaikan tujuan dirinya
 2. Merasa malu, males dan terkan
- C. Ridho Tuhan, Bersyukur, Iklas dan Tabah
- Mohon ridho dari Tuhan YME untuk berani bersikap terhadap permasalahan yang dihadapinya tanpa menyalahkan orang lain.

VIII. LANGKAH KEGIATAN

1. Tahap pengantaran
 - a. Penerimaan konseli dengan baik seperti menyapa, menyalam dengan sikap penerimaan yang baik dari konselor.
 - b. Mempersilakan duduk dengan sikap dan cara duduk konselor dalam menerima konseli.
 - c. Kontak psikologi yakni menerima keadaan konseli dengan membuka topik netral agar konseli merasa dirinya diterima.
2. Tahap penjajakan (Investigasi atau Pengumpulan Data)

Melakukan teknik-teknik konseling agar konseli dapat menceritakan keseluruhan permasalahannya, seperti konselor melakukan pertanyaan terbuka, dorongan minimal, refleksi, ajakan terbuka untuk berbicara, kesegaran dan sebagainya. Intinya konselor lebih banyak menerima data sedangkan konseli yang lebih aktif.

3. Tahap penafsiran (Diagnosa dan Prognosis)

- a. Diagnosa : menentukan faktor penyebab konseli bermasalah yakni konselor menyatakan berdasarkan data yang diterima dikaitkan dengan masalah yang dialaminya.
- b. Prognosis : konselor memberikan berbagai alternatif pemecahan masalah

4. Tahap pembinaan

Konselor menjelaskan alternative yang diberikannya dengan menggunakan teknik dan pendekatan konseling sehingga konseli menjadi paham dan jelas dengan permasalahan yang sedang dialaminya.

5. Langkah penilaian dan tindak lanjut

- a. Penilaian segera (laiseg) :
 1. Berpikir : siswa berpikir kedepannya apa yang akan dilakukannya
 2. Merasa : siswa merasakan perubahan dalam diriya ketika diberikan layanan
 3. Bersikap : apa yang hendak siswa lakukan berkenaan dengan sikap memotivasi ekonomi rendah

4. Bertindak : apa yang dilakukan siswa untuk membentengi dan menjauhkan diri dari teman sebaya yang mendekati ke sikap negative.
5. Bertanggung jawab : bersungguh-sungguh dalam berperilaku meningkatkan motivasi dalam kehidupan sehari-hari.

2. Hasil Wawancara dengan Responden

Dari hasil wawancara dengan responden dapat dilihat bahwa tingkat kesadaran dalam meningkatkan motivasi ekonomi rendah cukup berkurang karena siswa dapat mengendalikan diri mereka pada saat proses pendidikan lanjutan sekolah. Dapat dilihat dari tingkah laku siswa selama disekolah yang tekun dalam mengerjakan tugas sekolah. Permasalahan ekonomi rendah dapat diselesaikan dengan mendatangkan orang tua siswa yang sedang bermasalah dan guru wali kelas juga ikut dalam menyelesaikan masalah, agar permasalahan yang sedang dialami siswa dapat diselesaikan secara efektif dan adanya kejeeraan didalam dirinya. Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat dipahami bahwa dalam menyelesaikan permasalahan siswa dalam meningkatkan motivasi, para guru akan bekerja sama dengan guru bimbingan konseling dan orang tua untuk proses lebih lanjut.

3. Kesimpulan Hasil Wawancara dengan Responden

Dari hasil wawancara antara peneliti dengan responden dapat dinyatakan dari keterangan guru wali kelas bahwa masih banyak siswa yang suka merasa malu dan tidak percaya diri, tidak dapat mengendalikan dirinya didalam lingkungan sekolah. Dari hasil wawancara masih ada beberapa siswa yang belum mengerti dan

menerapkan meningkatkan motivasi dalam pendidikan lanjutan. Oleh karena itu peneliti melakukan layanan informasi sebanyak 1 kali pertemuan dengan topic cara mengatasi pendidikan lanjutan dengan ekonomi kurang mampu. Pada saat penelitian masih sedikit siswa yang memahami bagaimana cara meningkat motivasi, dan dari itu peneliti menanyakan pertanyaan tentang *bagaimana menurut anda ekonomi keluarga tidak mencukupi untuk melakukan pendidikan lebih lanjut ?* maka dari itu peneliti ingin menerapkan layanan informasi untuk menghindari ekonomi kurang mampu untuk pendidikan lanjut yang merajai diri siswa ketika didalam lingkungan sekolah dan lingkungan sosial.

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa sebelum peneliti melakukan layanan informasi antara guru bimbingan konseling dengan guru wali kelas kurang memiliki kerja sama yang akurat dan kurang baik. Setelah peneliti memberikan layanan informasi sudah mulai terlihat ada perubahan yang dimiliki siswa yang awalnya sering masuk ruang bimbingan konseling.

C. Diskusi Hasil Penelitian

Dalam penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana meningkat otivasi ekonomi kurang mampu untuk pendidikan lanjutan SMA di SMP Swasta Bandung tahun ajaran 2017/2018.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti dengan melakukan diskusi dengan teman sejawat dan dosen pembimbing serta do'a dan dukungan dari orang tua dan orang terkasih, akhirnya peneliti mendapatkan hasil bahwa data yang diperoleh sudah cukup akurat melalui proses observasi dan wawancara dan peneliti juga

mendapati hasil bahwa guru bimbingan konseling di SMP Swasta Bandung mendukung program bimbingan konseling yang telah dibuat oleh guru bimbingan konseling serta menyediakan ruangan khusus bagi guru bimbingan konseling telah melakukan tugas dan kewajibannya. Guru bimbingan konseling telah melakukan tugasnya dengan profesional dan sesuai prosedur. Wali kelas IX juga sudah melakukan tugasnya dengan baik dimana dalam menangani masalah siswa didiknya terlebih dahulu menyelesaikan secara sendiri dan apabila merasa kurang mampu, maka dapat melakukan koordinasi dengan guru bimbingan konseling dalam menangani permasalahan-permasalahan siswa-siswinya dan apabila terdapat tindak lanjut dapat dipanggil orang tua atau wali siswa.

D. Keterbatasan Peneliti

Peneliti mengakui bahwa penulisan skripsi ini dapat dikatakan belum sempurna, banyak kekurangan dan keterbatasan yang peneliti hadapi dalam penulisan skripsi ini. Penganalisaan dan hasil penelitian keterbatasan penulis hadapi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

- a. Keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis baik moral maupun moril dari awal pembuatan proposal serta pelaksanaan penelitian.
- b. Sulit mengungkapkan secara akurat penelitian meningkatkan motivasi ekonomi kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan melalui pemberian layanan informasi pada kelas IX SMP Swasta Bandung, karena alat yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

- c. Penelitian dilakukan relative singkat. Hal ini dikarenakan penulis mengingat keterbatasan waktu dan dana yang dimiliki penelitian.
- d. Keterbatasan waktu yang dimiliki peneliti untuk melakukan riset lebih lanjut pada siswa kelas IX SMP Swasta Bandung.
- e. Selain keterbatasan waktu peneliti juga menyadari bahwa kekurangan wawasan dalam penulisan dan pengetikan dalam membuat daftar pertanyaan wawancara yang baik dan baku dan dengan kurangnya buku pedoman dan referensi tentang teknik penyusunan daftar pertanyaan wawancara yang baik, merupakan keterbatasan penelitian yang tidak dapat dihindari, oleh karena itu dengan tangan terbuka penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan tulisan-tulisan dimasa mendatang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan atau lakukan mengenai Pemberian Layanan Informasi Untuk Meningkatkan Motivasi Ekonomi Kurang Mampu Untuk Melanjutkan Ke SMA Pada Siswa Kelas IX SMP SWASTA BANDUNG Tahun Pembelajaran 2017/2018, maka penulis menemukan beberapa kesimpulan.

1. Pelaksanaan layanan informasi dengan topik khusus sudah berhasil dilakukan di SMP SWASTA BANDUNG sudah dilaksanakan.
2. Meningkatnya motivasi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke SMA walau hanya dengan ekonomi yang sederhana.
3. Dari hasil penelitian, meningkatkan motivasi ekonomi kurang mampu untuk melanjutkan ke SMA terbilang cukup efektif dan efisien.

B. Saran

Dalam meningkatkan motivasi ekonomi kurang mampu untuk melanjutkan ke SMA melalui layanan Informasi, guru bimbingan konseling berupaya meningkatkan kualitas dalam pemberian layanan guna mengaplikasikannya dalam kegiatan layanan informasi siswa tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan maka penulis memberikan saran-saran yaitu :

1. Bagi siswa

Diharapkan kepada seluruh siswa dalam kegiatan belajar harus mengikuti berbagai peraturan serta tata tertib yang diberlakukan di sekolah dan setiap siswa dituntut untuk dapat berperan aktif.

2. Bagi orang tua

Diharapkan kepada orang tua siswa untuk dapat memotivasi dan memberikan dukungan penuh kepada anaknya serta memberikan pengawasan dalam hal kegiatan pengembangan layanan informasi.

3. Bagi guru bimbingan konseling

Diharapkan guru bimbingan konseling agar dapat berperan lebih aktif dalam mengarahkan, membantu dan membimbing para siswa dalam berperilaku lebih baik lagi.

4. bagi peneliti

Diharapkan kepada peneliti lain untuk lebih mengembangkan pembahasan mengenai penerapan layanan informasi untuk meningkatkan motivasi ekonomi kurang mampu untuk melanjutkan ke SMA, siswa dalam setiap pembelajaran.

5. bagi kepala sekolah

Diharapkan kepada kepala sekolah agar lebih mendukung dan tanggap terhadap proses konseling yang dilaksanakan dan mngupayakan untuk melengkapi saran dan prasarana di sekolah agar proses bimbingan konseling berjalan dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Analisis data kemiskinan.2010. kementrian sosial RI
- Darson, Max.2000. *belajar dan pembelajaran*. Semarang :IKP Semarang Press
- Dewi, R. 2012. *Penelitian Pendidikan*. Medan: Pasca Sarjana Unimed
- Djamrah, Syaiful Bahri. 2000. *Psikologi Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hamalik, Oemar.2003. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hudayana, Dadan.2009. *Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- Milfayetty, Sri. 2011. *Asesmen Psikologi Non Test*. Medan: Pasca Sarjana Unimed
- Pedoman Bidik Misi 2014
- Penddikan dan Kemiskinan. UU No. 20/2003, (online),
<http://www.pendidikankemiskinan.net/index.php/berita-nasional/uu>.
- Prayitno, H & Amti, E. 2004. *Dasar – Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta
- Prayitno. 2004. *Seri Layanan Konseling L.I/L.9 Layanan Orentasi*. Padang. UNP.
- Sardiman, A.M. 2005. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: Raja Grafindo
- Sudijono, A. 2008. *Pengantar statistic Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Winkel, W.S.2010. *Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar*. Surabaya: Gramedia
- Winkel, W.S.2005. *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*, edisi revisi. Jakarta: Gramedia
- Winkel dan astute, S.2006. *Bimbingan dan Konseling di Instusi pendidikan*. Yogyakarta: Media Abadi.